DAYA IKAT *FRAME WORK AGREEMENT* TERHADAP PIHAK KETIGA (STUDI KASUS TERHADAP NOTA KESEPAKATAN ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA MENGENAI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN)

Rudi Natamihardja

ABSTRAK

Kerjasama antara Indonesia dan Singapura mengenai kawasan ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun, Batam-Bintan-Karimun Special Economic Zone (BBK-SEZ) merupakan sebuah perjanjian bilateral dalam bentuk frame work agreement. Karena sifatnya open verdrag (terbuka), maka tidak menutup kemungkinan bagi para pihak ketiga menjadi peserta dalam perjanjian tersebut.

Kata Kunci: *Frame Work Agreement, Kawasan Ekonomi Khusus*

A. PENDAHULUAN

Salah satu faktor terciptanya hubungan antara negara yaitu karena adanya kepentingan yang saling menguntungkan. Hubungan antar negara dilakukan karena tidak ada satu negara pun yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bekerjasama dengan negara lain.

Hubungan antara negara merupakan kerjasama yang dapat dilakukan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, atau bidang lain yang dianggap perlu seperti pendidikan, hukum dan lain sebagainya.

Kerjasama antar negara merupakan peristiwa internasional yang memerlukan pengaturan berdasarkan ketentuan internasional. Hal ini harus dilakukan sebagai jaminan terhadap kegiatan dan pelaksanaan kesepakatan yang akan telah disepakati. Selain itu, kerjasama antara negara akan berjalan baik dan lancar serta memberikan rasa aman bagi para pihak.

Pada tanggal 25 Juni 2006¹ terjadi suatu kesepakatan antara Indonesia dengan Singapura mengenai pengembangan kawasan ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun, yang dikenal dengan istilah *Batam-Bintan-Karimun Special Economic Zone (BBK-SEZ)*. Kesepakatan ditandatangani oleh dua pejabat tinggi negara, Menko Perekonomian Boediono (Indonesia) dan Menteri Perdagangan Singapura Lim Hng Kiang (Singapura).

Konsep kerjasama yang diterapkan oleh kedua belah pihak adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), khususnya di pulau Batam, Bintan, dan Karimun. Selain itu diatur juga tentang promosi dan penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan fiskal yang berkenaan dengan pajak penghasilan dan yang tidak kalah pentingnya ialah promosi dan perlindungan penanaman modal yang nantinya akan diinvestasikan pada kawasan ekonomi khusus tersebut.

Penandatanganan kerjasama tersebut tertuang dalam bentuk Nota Kesepakatan (*Frame Work Agreement*), di mana kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura tentang pengembangan ekonomi sebelumnya, yaitu tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan fiskal yang berkenaan dengan pajak penghasilan (8 Mei 1990) dan kerjasama tentang kerja sama ekonomi dalam kerangka pengembangan Provinsi Riau (28 Agustus 1990). Kerjasama sebelumnya tersebut menciptakan pemasukan devisa negara, sehingga kemajuan ekonomi pada daerah segitiga emas tersebut sangat *significant*, namun krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997 mengakibatkan kehancuran kerjasama Indonesia dan Singapura.

Masalah utama yang perlu dibahas yaitu mengenai klasifikasi perjanjian internasional

sebagai sumber hukum formal. Perbedaan antara perjanjian bilateral dan multilateral masih menciptakan pendapat yang berbeda-beda tentang keduanya agar dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional. Namun menurut pendapat Mochtar Kusumatmadja keduanya merupakan suatu perjanjian internasional, baik yang bersifat *law-making treaty* dan *treaty contract*. Hal ini dikarenakan keduanya dapat menimbulkan hukum.¹

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional utama dan instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Dikarenakan pembuatan perjanjian merupakan perbuatan hukum, maka hal yang paling penting yang harus diperhatikan ialah, sudah cukupkah syarat-syarat dan unsur-unsur yang diperlukan dalam pembuatan suatu perjanjian internasional tersebut, karena perjanjian internasional itu akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum para pihak-pihak sesuai dengan isi perjanjian. Walaupun terdapat beragam nama yang diberikan (dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang sangat sederhana).

Kerjasama antara Indonesia dan Singapura mengenai pengembangan kawasan ekonomi khusus ini bersifat *treaty contract* dan merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak. Pada umumnya kerjasama atau perjanjian internasional yang bersifat *treaty contract* ini hanya menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pihak yang mengadakan perjanjian, karena dalam perjanjian itu sendiri umumnya hanya menyangkut soal-soal yang khusus². Oleh sebab itu sudah selayaknya apabila perjanjian *treaty contract* ini merupakan perjanjian yang tertutup (tidak membuka kemungkinan bagi pihak ketiga untuk turut sebagai pihak para peserta dari perjanjian).

Di dalam draft perjanjian antara Indonesia dan Singapura mengenai pengembangan kawasan

ekonomi khusus tertulis suatu ketentuan: "Persetujuan ini tidak akan menghalangi Republik Indonesia untuk melakukan kerja sama lain yang serupa dengan negara ketiga" (Pasal 7 ayat 1)³, hal ini bertentangan dengan makna *treaty contract* yang tidak membuka kemungkinan bagi pihak ketiga untuk turut sebagai pihak para peserta dari perjanjian.

Bertitik tolak dari paparan singkat di atas, permasalahan hendak dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah daya ikat Nota Kesepakatan (*Framework Agreement*) mengenai pengembangan kawasan khusus antara Indonesia dan Singapura terhadap pihak ketiga?

Kajian yang dilakukan secara studi kasus dengan analisis kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah Perjanjian Internasional

Dalam konperensi Wina tahun 1969 telah berhasil disepakati sebuah naskah Hukum Pejanjian yang lebih dikenal dengan nama *Vienna Convention on The Law of Treaties*. Konperensi ini diadakan atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan naskah rancangan konvensinya disusun oleh panitia Hukum Internasional atau *International Law Comission* (ILC), yang merupakan sebuah panitia ahli dan dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 174/II/1947.⁴) Beranggotakan para ahli hukum terkemuka dari berbagai bangsa dan sistem hukum. Dibentuknya Panitia Hukum Internasional ini adalah dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan amanat Pasal 13 Piagam PBB yang berbunyi: "Majelis Umum akan mengadakan penyidikan dan mengemukakan anjuran-anjuran (*recomendations*) dengan tujuan:

- a. memajukan kerjasama internasional di lapangan politik dan mendorong berkembangnya kemajuan dan kodifikasi hukum internasional;
- b. memajukan kerjasama internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan kesehatan, dan membantu

¹ Mochtar Kusmaatmadja. 1982. *Pengantar hukum Internasional*. Binacipta. Bandung, hlm. 88

² Syahmin A.K., 1985. *Hukum Perjanjian Internasional*, CV Armico. Bandung, hlm. 21

³ Draft Persetujuan Kerangka antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Ekonomi di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.

⁴ Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Tak Tertulis dalam Hukum Perjanjian Internasional*, Majalah Hukum dan Pembangunan, No.4 Th. Ke-XI Juli 1981, hlm. 344.

pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan bangsa, jenis, bahasa atau agama”.

Salah satu kesulitan yang kita temui dalam mempelajari masalah perjanjian adalah banyaknya istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional ini.⁵ Istilah-istilah itu seringkali mempunyai arti yang agak berbeda dengan perjanjian. Istilah yang dimaksud seperti misalnya *treaty*, *pact*, *convention*, *statue*, *charter*, *declaration*, dan lain sebagainya.

Mengenai peristilahan ini Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa, secara yuridis semua istilah ini tidak mempunyai arti tertentu, dengan perkataan lain semuanya merupakan perjanjian internasional dalam arti perjanjian internasional yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.⁶

Sehubungan dengan keanekaragaman istilah yang dipergunakan untuk perjanjian internasional ini, Mac Nair dalam bukunya *Law of Treaties* menekankan bahwa *The terminology employed to describe these instrument is confusing, often inconsistent, unscientific, and in perpetual state of flux.*

Sedangkan menurut Michael Akehurst, bahwa beberapa di antara kata-kata tersebut mempunyai makna yang relatif, seperti misalnya istilah-istilah perjanjian itu dapat pula diartikan lain daripada perjanjian, sehingga menjadi suatu hal yang dapat membingungkan, dengan demikian istilah-istilah tersebut merupakan salah satu kesulitan tersendiri dalam mempelajari masalah perjanjian itu sendiri.

Untuk lebih memudahkan pemahaman kita tentang istilah-istilah perjanjian internasional, maka akan dipaparkan makna-makna dari istilah-istilah yang pernah digunakan oleh para ahli hukum ternama sebagai nama dari suatu perjanjian internasional, yaitu;

Treaties: Terminology *treaty*⁷ dapat dipergunakan menurut pengertian umum atau pengertian khusus.

Yang dimaksudkan dengan pengertian umum ialah bahwa *treaty* mencakup segala bentuk perjanjian internasional, sedangkan dalam arti khusus *treaty* merupakan perjanjian yang paling penting dan sangat formal dalam urutan perjanjian. Menurut pengertian umum, istilah *treaty* dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah perjanjian internasional. Dalam artian ialah perjanjian internasional yang dibuat oleh subjek-subjek hukum internasional dan memiliki kekuatan mengikat menurut hukum internasional.

Menurut pengertian khusus, terminologi *treaty* dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah traktat. Hingga saat ini, tidak terdapat pengaturan yang konsisten terhadap penggunaan terminologi traktat tersebut. Umumnya traktat digunakan untuk suatu perjanjian yang materinya merupakan hal-hal yang sangat prinsipil. Kadangkala perjanjian tersebut memerlukan adanya pengesahan atau ratifikasi. Jenis perjanjian yang termasuk traktat diantaranya perjanjian yang mengatur masalah perdamaian, perbatasan negara, ekstradisi, delimitasi dan persahabatan, sebagai contoh Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara, 24 Februari 1976 (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*) adalah contoh yang sangat resmi yang pernah dibuat Indonesia dan yang ditandatangani oleh kepala negara dan pemerintah negara-negara ASEAN. Perjanjian yang semacam ini mengikuti prosedur pembuatan perjanjian yang paling lengkap yang terdiri dari perundingan, penandatanganan dan ratifikasi. Demikianlah walaupun pada umumnya perjanjian internasional (*treaty*) dipakai untuk soal yang sangat penting misalnya yang menyangkut persahabatan, perdamaian dan keamanan tetapi juga dapat dipakai untuk hal-hal lain tergantung dari kebiasaan masing-masing negara.

Convention (Konvensi): Terminologi *Convention* juga mencakup pengertian perjanjian internasional secara umum. Dalam kaitan ini, Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menggunakan istilah *international Conventions* sebagai salah satu sumber hukum internasional. Dengan demikian, menurut pengertian umum, terminologi *convention* dapat disamakan dengan pengertian umum terminology *treaty*. Dalam praktek internasional kedua istilah ini menduduki tempat paling tinggi dalam urutan perjanjian

⁵ Syahmin A.K. op. cit. hlm. 2

⁶ Syahmin A.K. op. cit. hlm. 3

⁷ Menurut bunyi Surat Presiden RI kepada Ketua DPR tertanggal 22 Agustus 1960 No.2826/HK/60, perihal: pembuatan perjanjian-perjanjian dengan negara lain, istilah *treaty* dipergunakan untuk perjanjian yang terpenting saja.

internasional. Dalam *Oxford Learners english, Conventions*⁸ ialah *Convention means agreement on how people behave by meeting of the members of a society, political party.*

Dalam pengertian khusus, terminologi *convention* dikenal dengan dengan istilah bahasa Indonesia sebagai konvensi, istilah ini cenderung dipergunakan untuk jenis perjanjian multilateral yang membentuk hukum (*multilateral law-making Treaties*).⁹) Ternyata dalam praktekpun perkataan *convention* inilah yang paling populer. Mengenai *Law making Treaties* ialah merupakan salah satu klasifikasi perjanjian yang merupakan sumber hukum internasional langsung. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa konvensi yaitu; konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang, konvensi Wina 1961 dan 1963 mengenai Hubungan Diplomatik dan Hubungan Konsuler, konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982 dan sebagainya.

Agreement (Persetujuan): Dalam Bahasa Indonesia lazim diterjemahkan dengan persetujuan. Pada hakekatnya istilah *agreement* adalah suatu terminologi dipakai untuk suatu bidang atau scope lebih sempit dibandingkan dengan *treaty* atau *convention*. Namun dalam prakteknya *agreement* ini sering pula dilakukan oleh Kepala Negara. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah persetujuan bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral.

Charter (Piagam): Charter atau piagam adalah lebih tepat dari "Covenant" karena *charter* lebih sesuai dengan arti konstitusi atau Undang-Undang Dasar,¹⁰ sedangkan *covenant* mempunyai arti *treaty* atau perjanjian internasional. Istilah *Charter* ini umumnya digunakan untuk perangkat internasional seperti dalam pembentukan suatu organisasi internasional. Penggunaan istilah ini berasal dari Magna Carta yang dibuat pada 1215, contoh lainnya sebagai perangkat Internasional adalah Piagam PBB (*The Charter of the United Nations*) dan Piagam Atlantik (*Atlantik Charter*).

Protocol (Protokol): *Protocol is a part in rule system of behaviour at formal occasions*¹¹, berarti suatu dokumen yang penting yang sering dipergunakan untuk menetapkan suatu persetujuan internasional, meskipun lazimnya bersifat perjanjian tambahan yang tidak begitu resmi dan penting seperti suatu *treaty*. Akan tetapi dalam perkembangannya sekarang, protokol justru sama pentingnya dengan *treaty* itu sendiri.¹² Seperti misalnya Protokol Tambahan terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dimana menjelang akhir tahun 1982 Protokol I sudah diratifikasi oleh 27 negara, dan Protokol Tambahan II diratifikasi oleh hanya 23 Negara. Hal ini menunjukkan bahwa protokol sebagai bentuk *treaty* merupakan tambahan (*suplement*) dari suatu perjanjian utama dan juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian utamanya.

Declaration (Deklarasi): Deklarasi juga merupakan suatu perjanjian dan berisikan ketentuan-ketentuan umum dimana pihak-pihak pada deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu dimasa yang akan datang. Bedanya dengan perjanjian atau konvensi ialah deklarasi isinya ringkas dan padat serta mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang hanya bersifat formal seperti surat kuasa (*full powers*)¹³, ratifikasi dan lain-lainya. Declaration ini dalam Bahasa Indonesia disebut deklarasi, namun ternyata oleh Ali Sastromidjojo dalam bukunya "Pengantar Hukum Internasional"¹⁴, deklarasi dibagi tiga jenis pengertian, yaitu;

- a. Deklarasi sebagai nama daripada suatu perjanjian, yang mengikat para penandatanganannya. Seperti contohnya Deklarasi Paris tahun 1856 dan Deklarasi St. Peterburg dalam tahun 1868.
- b. Deklarasi sebagai pernyataan sepihak (unilateral), misalnya pernyataan perang

⁸ Oxford Learner's Pocket Dictionary, Oxford University Press, Twelfth Impression 2000, hlm. 89.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja., *Pengantar Hukum Internasional*. Cet. Keempat, Binacipta., Bandung 1982., hlm. 115

¹⁰ Syahmin A.K., op. cit., hlm. 6

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta., 2002, hlm. 377

¹² AJIL., *Notes and Comments On the Inadequate Reach of Humanitarian And Human Rights Law and the Need for a New Instrument.*, Vol. 77 No. 3. July 1983. hlm 591. Syahmin A.K. op. cit hlm. 6

¹³ Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian, Pasal 2 Ayat (c).

¹⁴ Ali Sastromidjojo. 1971. *Pengantar Hukum Internasional*. Bharata. Jakarta. hlm. 110-111.

(*declaration of war*) dan pernyataan netralitas (*declaration of neutrality*)

- c. Deklarasi sebagai pernyataan suatu negara kepada negara-negara lain dengan maksud memberi penjelasan mengenai tindakan-tindakan atau maksud-maksud tertentu yang dilakukannya. Sebagai contoh daripada pernyataan demikian itu ialah pernyataan yang terkenal dengan nama "*Atlantic Charter*" yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Churchill pada tanggal 14 Agustus 1941.

Final Act: *Final Act* adalah suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan sidang dari suatu konferensi dan yang juga menyebutkan perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang dihasilkan konferensi tersebut. Kadangkala dengan disertai anjuran atau harapan yang sekiranya dianggap perlu. Penandatanganan *Final Act* ini sama sekali tidak berarti penerimaan terhadap perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang dihasilkan tetapi hanya semacam kesaksian berakhirnya suatu tahap proses pembuatan perjanjian. Penandatanganan dalam arti salah satu tahap ratifikasi dilakukan kemudian pada lain kesempatan. Sebagai contoh pada *Final Act General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* 1994 dan *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiating* 1994.

Memorandum of Understanding: Perjanjian ini merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Sepanjang materi yang diatur bersifat teknik, memorandum saling pengertian dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan adanya perjanjian induk. Jenis perjanjian ini umumnya dapat segera berlaku tanpa memerlukan pengesahan.

Arrangement: *Arrangement* adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Istilah ini juga sering dipakai untuk melaksanakan proyek-proyek jangka pendek. Misalnya *Arrangement Studi Kelayakan Proyek Tenaga Uap di Aceh* pada tanggal 19 Februari 1979 antar Departemen Pertambangan RI dengan *President the*

Canadian International Development Agency. Pada prinsipnya *Arrangement* dikategorikan sama dengan *Agreement*, sebagai perjanjian yang relatif kurang penting bila dibandingkan dengan *Treaty* dan *Convention*. Seiring perkembangan zaman *Arrangement* juga disebut sebagai *Contract of Law*.

Convenant: Istilah atau pengertian *Covenant* disamakan dengan *Agreement* dan *Convention*. Dalam Praktek penggunaan *Covenant* tidak terlalu sering seperti penggunaan *Convention* atau *Agreement*, walaupun hal-hal yang diatur di dalamnya cukup penting, seperti misalnya *International Covenant on Economic and Political Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. *Covenant* juga digunakan untuk perjanjian yang membentuk dan melandasi organisasi internasional, seperti halnya dengan *Charter*, yaitu sebagai contoh *Covenant of the League of Nations*.

Statue: *Statue* diterminologikan sebagai suatu anggaran dasar suatu organisasi internasional, misalnya "*Statue of the International Court of Justice*" atau merupakan anggaran dasar untuk beroperasinya suatu lembaga yang mempunyai fungsi pengawas Internasional. Namun istilah ini seringkali dipergunakan untuk memasukan ketentuan yang dipandang sebagai hukum stabil, dan juga untuk mendirikan lembaga-lembaga di bawah pengawasan lembaga tersebut.

Di samping istilah tersebut di atas, masih banyak lagi istilah asing lainnya yang merupakan sinonim daripada perjanjian internasional, seperti *Exchange of Notes*, *Modus Vivendi*, *Accord*, *Compromis* dan sebagainya. Namun dilihat secara yuridis semua istilah ini tidak mempunyai arti tertentu secara pasti, dengan perkataan lain semuanya merupakan perjanjian internasional sesuai dengan penulis uraikan di atas.

Pengertian Perjanjian Internasional

Mengenai pengertian perjanjian internasional, secara definitif adalah sukar, sebagaimana juga apabila menghadapi dalam pencarian batasan hukum. Namun, mengenai batasan tentang suatu arti dari perjanjian internasional dibawah ini akan ditampilkan

beberapa gambaran dari arti suatu perjanjian internasional oleh beberapa pakar ahli hukum.

Menurut Ian Brownlie dalam bukunya *Principles of Public International Law*¹⁵ yaitu; *"Treaty as an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instrument and what ever its particular designation"*.

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subyek-subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Dari uraian diatas dapat ditarik suatu intisari bahwa yang mempunyai kemampuan untuk melakukan atau mengadakan perjanjian internasional tidak hanya terbatas pada negara saja, akan tetapi bisa dilakukan juga pada subyek-subyek hukum internasional lainnya. Seperti perusahaan multinasional, Organisasi Internasional, kaum belligerent, orang perorangan dan sebagainya. Pengertian perjanjian internasional yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja agak sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh A.S. Hershey, yang hanya membatasi negara saja yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional.¹⁶ Hal ini sesuai dengan definisi yang ia berikan yaitu;

International treaties or convention are agreement or contract between two or more states, usually negotiated for the purpose of creating, modifying or extinguishing mutual and reciprocal obligations.

Pengertian yang sama dengan apa yang telah dikutip di atas dikemukakan oleh *Academy of Sciences of USSR*,¹⁷ yang berbunyi;

Suatu perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan daripada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal-balik.

Semakin kompleksnya pendapat para ahli mengenai suatu pandangan tentang perjanjian internasional dikarenakan peran perjanjian internasional itu sendiri sebagai sumber hukum internasional. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari:

- Perjanjian Internasional (*International Conventions*), baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus;
- Kebiasaan Internasional (*International Custom*);
- Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara beradab;
- Keputusan pengadilan (*judicial decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teaching of the most highly qualified publicist*) merupakan sumber tambahan hukum internasional.

Sehubungan dengan itu semua dapat dilihat dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969, tentang pengertian perjanjian internasional:

Treaty means an international agreement conclude between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designations.

Adapun maksud dari pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian itu adalah merupakan suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional dan dibuat tertulis oleh hukum internasional, dan apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun namanya yang diberikan pada instrument-instrument perjanjian internasional tersebut.

Beranjak dari ketentuan hukum internasional tersebut Negara Indonesia juga mempunyai pengertian tersendiri mengenai konsep perjanjian internasional yang diratifikasi

¹⁵ Ian Brownlie, 1979. *Principle of Public International Law*. Oxford University Press, 3rd.ed. hlm. 602., Kutip Syahmin A. K. op.cit hlm. 9

¹⁶ A.S. Hershey. *The Essensial of International Public Law and Organization.*, dikutip dari Sam Suhaidi Admawiria., *Pengantar Hukum Internasional (II)*., CV Aula, 1996 hlm. 249.

¹⁷ Ibid. hlm. 1174, Syahmin A.K. op. cit. hal. 10

dengan undang-undang Indonesia. Pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa:

Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Kemudian diatur pula dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yaitu: "Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum lainnya".

Berdasarkan pada definisi dan pendapat para ahli hukum di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subyek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional yang dalam perjanjian internasional tersebut terdapat unsur asing yang melibatkan subyek hukum internasional lainnya dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.

Klasifikasi Perjanjian Internasional

Berdasarkan pada ajaran dari literatur dan pendapat para ahli sarjana ternama, kita dapat memberikan perincian tentang perjanjian internasional itu ke dalam kelompok/golongan dalam beberapa macam,¹⁸ yang dapat ditinjau dari berbagai segi atau didasarkan pada hal-hal sebagai berikut; Subyek (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian, jumlah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, proses/tahap-tahap pembentukan perjanjian, sifat pelaksanaan perjanjian itu sendiri, dan fungsinya dalam pembentukan hukum.

Klasifikasi Perjanjian Internasional Dilihat dari Segi Pihak-pihak yang Mengadakan Perjanjian Internasional

Perjanjian antar negara, merupakan jenis perjanjian yang jumlahnya paling banyak. Hal ini dapat dipahami oleh karena adalah merupakan subyek hukum internasional yang paling utama.

Perjanjian antar negara dan subyek hukum internasional lainnya, seperti misalnya dengan organisasi internasional, atau dengan Vatikan Roma, kaum belligerent atau sebagainya.

Perjanjian antar subyek hukum internasional lain selain negara dengan satu sama lainnya. Khususnya antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya.

Klasifikasi Perjanjian Ditinjau dari Sudut Para Pihak yang Mengadakannya

Penggolongan perjanjian internasional ini dapat kita bedakan dalam dua macam, yaitu;

Perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang hanya diadakan oleh dua pihak (negara) saja. Pada umumnya perjanjian ini hanya mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kedua belah pihak saja. Oleh karena itu sifat dari perjanjian ini adalah tertutup (*gesloten Verdrag*), artinya tertutup kemungkinannya bagi pihak ketiga untuk ikut sebagai pihak peserta dari perjanjian bilateral ini dan sering disebut sebagai perjanjian kontrak (*treaty contract*).

Perjanjian multilateral, adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak (negara), yang pada umumnya merupakan perjanjian terbuka, (*open verdrag*), di mana hal-hal yang diaturnya pun lazimnya hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak hanya menyangkut kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja, melainkan menyangkut pula kepentingan lain yang bukan peserta perjanjian itu sendiri. Perjanjian jenis inilah yang umumnya dikategorikan sebagai *law making treaties* atau perjanjian yang membentuk hukum.

Klasifikasi Perjanjian Ditinjau dari Proses Tahap Pembentukannya

Perjanjian yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan, yaitu perundingan penandatanganan, dan ratifikasi. Perjanjian ini

¹⁸ Syahmin A.K. op. cit hlm. 11

umumnya ada pada perjanjian multilateral dan bersifat universal. Perjanjian yang memerlukan ratifikasi biasanya berlaku setelah adanya undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang perjanjian internasional.

Perjanjian yang hanya melewati dua tahap pembentukan yakni perundingan dan penandatanganan. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang sederhana sifatnya dan memerlukan penyelesaian yang cepat sesuai dengan isi kontrak atau perjanjian tersebut. Biasanya perjanjian jenis ini dapat segera berlaku tanpa memerlukan ratifikasi, seperti misalnya perjanjian perdagangan, pertukaran kebudayaan dan pertukaran pelajar.

Klasifikasi Perjanjian Dilihat dari Sifat Pelaksanaannya

Dispositive treaties (perjanjian yang menentukan) adalah perjanjian yang maksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai dengan pelaksanaan isi daripada perjanjian tersebut. Seperti misalnya perjanjian tentang penentuan batas-batas negara, penyerahan wilayah, kedaulatan ataupun kemerdekaan.

Executory treaties (perjanjian yang dilaksanakan) adalah perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekaligus, melainkan harus dilanjutkan terus menerus, selama jangka waktu perjanjian yang berlaku, contohnya adalah perjanjian perdagangan.

Klasifikasi Perjanjian Dilihat dari Fungsinya

Law-making treaties (perjanjian yang membentuk/menciptakan hukum) adalah perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaedah-kaedah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, yang pada umumnya terdapat pada perjanjian multilateral. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mochtar Kusumatmadja dan Oscar Svarlien¹⁹⁾ yang menyatakan bahwa;

A law-making treaty is a multilateral arrangement, or treaties lod, which has the affect of setting up certain legal norms for the conduct of states in their mutual intercourse.

Adapun beberapa contoh dari perjanjian internasional yang berfungsi sebagai law makin treaties yaitu; Konvensi Jenewa tahun 1864, 1906 dan 1949 yang melahirkan aturan hukum mengenai perlindungan korban perang, Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 yang melahirkan aturan hukum tentang larangan untuk melepaskan proyektil dan bahan peledak dari balon udara, Piagam PBB tahun 1945, Konvensi Wina tahun 1815, 1961 dan 1963 tentang Hubungan Luar Negeri dan lain sebagainya.

Treaty-contract (perjanjian yang bersifat kontrak) adalah perjanjian yang serupa dengan kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata hanya mengakibatkan hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja. Perjanjian ini pada umumnya merupakan perjanjian bilateral yang *legal effect*nya hanya menyangkut para pihak saja. Perjanjian inipun termasuk perjanjian yang tertutup yang sebagian besar tidak membuka kemungkinan bagi pihak ketiga untuk turut sebagai pihak peserta perjanjian tersebut dan umumnya perjanjian ini mengatur hal-hal khusus seperti perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan kepentingan politik.

Pengertian Daya Ikat dan Negara Ketiga

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa suatu perjanjian internasional hanya mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Hal ini sesuai dengan azas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, dan Pasal 34 konvensi Wina tahun 1969 yang menegaskan bahwa suatu perjanjian internasional tidak memberikan hak ataupun kewajiban kepada negara pihak ketiga, tanpa persetujuan negara pihak ketiga tersebut. Sebagai contoh jurisprudensi,²⁰⁾ kita dapat menyebut kasus Pulau Palmas, yaitu sengketa antara Amerika Serikat dan Belanda mengenai pulau tersebut. Hakim Internasional Mac Huber, dalam keputusannya tahun 1928 menyebutkan di samping itu jelaslah juga bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Spanyol dengan negara-negara ketiga yang mengakui kedaulatan-

¹⁹⁾ Oscar Svarlien., *An Introduction to the Law Of Nations.*, Mc-Graw-Hill, Book Company, Inc. New York-Toronto-London, 1955 hal. 65. Syahmin A.K. op. cit hlm. 16.

²⁰⁾ E. Jimenez de Arehaga, *Treaty Stipulations in favour of third States.*, A.J.I.L. 1956, p. 353-357. kutip dari International Center for Transitional Justice (ICTJ) July 2006 Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 <http://www.google/informasi/kasus/negaraketiga/perjanjian/ictj.htm>

nya di Filipina tidak akan dapat mengikat negeri Belanda.

Sepenggal putusan ini jelas merupakan suatu aplikasi tentang azas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* dalam dunia internasional.

Lauterpact²¹ juga mengatakan bahwa; *International treaties are agreement, or contractual character between states, or organisations of states, creating legal right and obligations between the parties.*

Persoalan daya ikat (*binding force*) suatu perjanjian internasional dapat dikembalikan kepada tujuannya pada waktu mengadakan perjanjian tersebut. Sehingga daya ikat perjanjian internasional dapat diartikan sebagai pemberlakuan perjanjian internasional tersebut terhadap pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dengan segal hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian itu.

Akibat Hukum Kerjasama Bagi Negara-Negara Peserta dan Pihak Ketiga

Daya Ikat Perjanjian Terhadap Negara-negara Pihak Ketiga

Sebagai sumber utama hukum internasional, perjanjian internasional akan mengikat negara-negara pihak yang telah menyepakati dan menandatangani perjanjian. Sifat mengikat ini bermakna bahwa negara-negara pihak dalam perjanjian harus mentaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut dan organ-organ negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya. Daya ikat suatu perjanjian internasional didasari atas prinsip dasar *pacta sunt servanda*.

Di dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian dinyatakan bahwa; Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat Negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*). Prinsip ini merupakan asas dasar dalam hukum perjanjian dan telah diakui secara universal sebagai prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*). Prinsip itikad baik selalu disebutkan dalam keputusan-keputusan

peradilan-peradilan arbitrase internasional dalam. Dinyatkan pula di dalam Pasal 2 Piagam PBB ayat 2 antar lain; Semua Negara harus melaksanakan dengan itikad baik semua kewajiban-kewajiban sesuai dengan piagam.

Setelah undang-undang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya organ eksekutif bertindak sebagai badan pelaksana. Pelaksanaan perjanjian, dilakukan oleh semua organ negara yang terikat dalam perjanjian (subjek dalam perjanjian), karena pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan tanggung jawab negara dalam arti keseluruhannya.²²

Perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan di dalam negeri, begitu pula kerjasama antara negara Indonesia dan Singapura mengenai pengembangan kawasan ekonomi di Pulau Batam, Bintan dan Karimun yang akan berdampak langsung kepada daerah yang diperjanjikan sehingga, diperlukan koordinasi yang sangat berkesinambungan dengan daerah pusat dengan daerah kawasan ekonomi.

Penerimaan perjanjian baik yang telah diratifikasi melalui undang-undang maupun keputusan presiden harus diumumkan dengan cara-cara tertentu. Di Indonesia, dalam meratifikasi suatu perjanjian internasional pada klausula akhir selalu terdapat ketentuan yang berbunyi: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang atau keputusan Presiden ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Hal ini bermakna bahwa prosedur pengumuman perjanjian-perjanjian di Indonesia yaitu dengan pengundangan perjanjian-perjanjian tersebut.

Daya Ikat Perjanjian Terhadap Pihak Ketiga

Suatu Perjanjian Internasional sudah barang tentu mengikat negara-negara peserta. Kemudian bagaimana halnya terhadap negara pihak ketiga atau negara bukan peserta?. Mengenai hal ini dapat dilihat pada Pasal 34 Konvensi Wina tahun 1969 yang menyatakan; *A treaty does not create either obligations or rights for a third state without its consent*, jadi suatu perjanjian tidak mengikat atau tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun terhadap negara bukan peserta,

²¹ Oppenheim Lauterpacht., *International Law*, 8th ed., Longmans., 1967. hlm. 877²² Syahmin A.K. op. cit hlm 83

²³ Dharma Setiawan, 1986, *Daya Ikat Perjanjian Internasional Terhadap Negara Ketiga*, Skripsi Strata I Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 3

²² Syahmin A.K. op. cit hlm 83

tanpa persetujuan darinya. Apabila diperhatikan ternyata pasal tersebut senada dengan suatu asas hukum dalam bahasa latin berbunyi "*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*" maksudnya ialah suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dan tidak memberi keuntungan maupun menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Dengan kata lain bahwa suatu perjanjian tidak menimbulkan akibat hukum tertentu terhadap negara pihak ketiga.²³

Asas hukum di atas merupakan prinsip dasar atau asas hukum perjanjian, baik perjanjian dalam suasana hukum nasional maupun perjanjian internasional yang diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional. Bahkan asas tersebut tidak hanya sebagai asas hukum, melainkan juga sesuatu yang masuk akal karena bagi pihak ketiga suatu perjanjian merupakan *res inter alios acta*²⁴ yang berarti bahwa segala perbuatan hukum dilakukan dengan penuh kesadaran dan logis.

Akan tetapi apakah asas tersebut selamanya dapat dipertahankan sepenuhnya? Sebut saja dalam praktek perjanjian internasional yang berkembang dewasa ini, ternyata kenyataannya menunjukkan bahwa terdapat pengecualian-pengecualian terhadap asas ini. Antara lain salah satu contohnya dalam Pasal 2 Ayat (6) piagam PBB yang menyatakan bahwa; *The organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these principle so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.*

Pasal 32 Piagam PBB menyatakan: *Any member of the United Nations which is not a member of the security Council or any state which is not member of the United Nations, if its party to dispute under consideration by the Security Council, shall be invited to participate, without vote, in the discussion on relating to the dispute. The Security Council shall lay down such conditions as it deems just for the participation of a state which is not a Member of the United Nations.*

Pada kenyataannya Pasal 2 Ayat (6) dan pasal 342 Piagam PBB di atas terlihat memberikan hak dan kewajiban tertentu pada negara bukan anggota PBB. Dan ternyata pula Pasal 34 Konvensi Wina tahun 1969 yang merupakan *general rule regarding third states* dalam prakteknya tidak dapat dipertahankan sepenuhnya, atau dengan kata lain bahwa terdapat pengecualian terhadap asas tersebut.

Apakah perjanjian-perjanjian internasional dapat berlaku bagi Negara-negara lain? Di sini berlaku prinsip terkenal apa yang dinamakan *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang berarti bahwa perjanjian-perjanjian tidak dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak kepada Negara ketiga, tanpa persetujuan negara pihak terlebih dahulu. Namun ada beberapa pengecualian terhadap prinsip-prinsip yang tersebut diatas,²⁵ yaitu:

- a. perjanjian yang dapat mempunyai akibat kepada Negara ketiga atas persetujuan mereka;
- b. perjanjian yang memberikan hak kepada Negara ketiga;
- c. perjanjian yang dapat mempunyai akibat kepada Negara ketiga tanpa persetujuan mereka.

Namun dalam pembahasan daya ikat perjanjian terhadap negara ketiga ini penulis hanya membatasi permasalahan yang akan dibahas pada perjanjian yang dapat mempunyai akibat kepada Negara ketiga atas persetujuan mereka. Hal ini sesuai pada Pasal 7 Ayat (1). Persetujuan Kerangka Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Ekonomi Di Pulau Batam, Bintan Dan Karimun dijelaskan bahwa; "Persetujuan ini tidak akan menghalangi Republik Indonesia untuk melakukan kerja sama lain yang serupa dengan Negara ketiga". Sehingga Indonesia sebagai pemilik Pulau Batam, Bintan dan Karimun berhak mengadakan perjanjian internasional lainnya dengan pihak lain.

Persetujuan Kerangka Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Ekonomi Di Pulau Batam, Bintan Dan Karimun merupakan perjanjian bilateral yang bersifat terbuka, yang

²³ Dharma Setiawan, 1986, *Daya Ikat Perjanjian Internasional Terhadap Negara Ketiga*, Skripsi Strata I Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 3

²⁴ Lord Mc Nair., *The Law Of Treaties.*, 1st ed., Claren Don Press., Oxford. 1961. dikutip dari skripsi Dharma Setiawan, *Daya Ikat Perjanjian Internasional Terhadap Negara Ketiga*, Skripsi Strata I Fakultas Hukum Universitas Lampung.

²⁵ Syahmin AK. op cit hlm. 88

berarti bahwa negara ketiga dapat menjadi peserta dengan cara turut serta tentunya. Dalam hal ini negara ketiga akan dapat memperoleh hak yang dimaksud, apabila negara ketiga telah menjadi peserta dalam perjanjian yang bersangkutan. Pernyataan negara ketiga untuk ikut atau terikat dengan perjanjian ini adalah dengan membuat perjanjian yang baru yang sesuai dengan kebutuhan yang ada pada negara ketiga tersebut dan negara-negara peserta sebelumnya. Selain itu apabila Negara ketiga mempunyai kesamaan visi atau misi dengan perjanjian terdahulu, maka terikatnya suatu negara dapat ditandai dengan ratifikasi ataupun *acceptance* dan *approval*. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Konvensi Wina tahun 1969, yang menyebutkan: *The consent of a state to be bound by a treaty is expressed by acceptance or approval under conditions similar to those which apply to ratifications*. Konsekuensinya pihak ketiga harus membuat perjanjian baru yang menyusun kepentingan antara negara tersebut dan Indonesia.²⁶⁾

Dasar berlakunya perjanjian terhadap Negara ketiga dapat kita temui dalam pasal 35, 36 dan 37 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian. Pasal 35 Konvensi Wina tahun 1969 menyatakan;

An obligation arises for a third states from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to be the means of establishing the obligation and the third state expressly accepts the obligation in writing.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa suatu perjanjian internasional dapat menetapkan kewajiban kepada Negara ketiga, apabila hal itu ditentukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian dan disetujui oleh Negara ketiga secara tegas dan secara tertulis.

Pasal 36 Konvensi Wina 1969 dengan judul *Treaties providing for rights for third states* Menyatakan;

1. *A right arises for a third states from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to accord that right either to third state. Or to a group of states to which it belongs, or to all states*

and the third states assents there to. Its assent shall be presumed so long as the contrary is not indicated, unless the treaty otherwise provides.

2. *A State exercising a right in accordance with paragraph 1 shall comply with the conditions for its exercise provides for in the treaty or established in conformity with the treaty.*

Apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak kepada Negara ketiga, pemberian hak itu harus ditentukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Dan terhadap pemberian hak tersebut, persetujuan dianggap ada apabila dinyatakan sebaliknya/berlawanan atau ditentukan lain dalam perjanjian itu.

Pasal 37 Konvensi Wina tahun 1969 dengan judul *Revocation or modification of obligations or rights of third state* menyatakan;

1. *When an obligation has arisen for a third state in conformity with article 35, the obligations may be revoked or modified only with the consent of the parties to the treaty and of the third state, unless it is established that they had otherwise agreed.*
2. *When a right has arisen for a third states in conformity with article 36, the right may be revoked or modified by the parties if it is established that the right was intended not to be revocable or subject to modification without the consent of the third states.*

Pasal ini menentukan baik hak maupun kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 dan 36 tidak dapat ditarik kembali atau diubah kecuali apabila hal itu disetujui baik oleh para pihak ataupun oleh Negara ketiga (Negara yang menerima hak dan yang dibebani kewajiban). Sebagai contoh²⁷⁾ pada tahun 1815 setelah perang napoleon berakhir, diadakan perjanjian antar Negara-negara yang menetapkan bahwa daerah Savoy dan Gex, yaitu daerah yang berbatasan antara Perancis dan Swiss dijadikan daerah yang bebas dari bea cukai. Dalam perjanjian tersebut Swiss sendiri tidak ikut dalam perjanjian tersebut dan hanya menjadi pihak ketiga. Sesudah PD 1

²⁶⁾ Ron., *KEKI Perlu Peraturan Yang Jelas*, Artikel Majalah Infrastruktur : Edisi Khusus Mei-Jul - May 2006., <http://www.presidensby.info/index.php/uu/keputusan-presiden/>

²⁷⁾ Dharma Setiawan. 1986, *Daya Ikat Perjanjian Internasional Terhadap Negara Ketiga*. Skripsi Strata I Fakultas Hukum Universitas Lampung. hlm 49

berakhir Perancis hendak menghapuskan daerah-daerah bebas bea cukai tersebut. Tetapi Swiss tidak setuju karena Swiss menganggap negaranya sebagai Negara ketiga yang menikmati hak yang diberikan oleh perjanjian. Kemudian perkaranya diajukan ke PCIJ yang pada tahun 1932 memberikan keputusannya setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

- a. bahwa tidak ada larangan dalam hukum internasional untuk memberikan hak kepada pihak ketiga, jika hal itu memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian;
- b. bahwa ketentuan tentang pemberian hak pada pihak ketiga itu harus dengan tegas dinyatakan dan tidak boleh begitu saja dianggap mengikat

Walaupun pemberian hak kepada Negara ketiga sudah sejak lama dipraktikkan dalam perjanjian internasional, namun bentuk dan syaratnya baru diformulasikan agak jelas dalam hukum internasional sejak adanya pendapat dari PCIJ, melalui keputusannya dalam *Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex Case* tahun 1932 yang telah dikemukakan di atas.

Persetujuan Kerangka Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Ekonomi Di Pulau Batam, Bintan Dan Karimun merupakan perjanjian bilateral yang bersifat terbuka, yang berarti bahwa negara ketiga dapat menjadi peserta dengan cara turut serta tentunya. Dalam hal ini negara ketiga akan dapat memperoleh hak yang dimaksud, apabila negara ketiga telah menjadi peserta dalam perjanjian yang bersangkutan. Pernyataan negara ketiga untuk ikut atau terikat dengan perjanjian ini adalah dengan membuat perjanjian yang baru yang sesuai dengan kebutuhan yang ada pada negara ketiga tersebut dan negara-negara peserta sebelumnya. Selain itu apabila Negara ketiga mempunyai kesamaan visi atau misi dengan perjanjian terdahulu, maka terikatnya suatu negara dapat ditandai dengan ratifikasi ataupun *acceptance* dan *approval*. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Konvensi Wina tahun 1969, yang menyebutkan:

The consent of a state to be bound by a treaty is expressed by acceptance or approval

under conditions similar to those which apply to ratifications.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Persetujuan Kerangka Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Ekonomi di Pulau Batam, Bintan dan Karimun merupakan perjanjian bilateral yang mempunyai sifat tertutup, namun tidak menutup kemungkinan bagi para pihak ketiga apabila ingin menjadi peserta dalam perjanjian tersebut dengan cara membuat perjanjian bilateral dengan obyek serupa.
- b. Pasal 7 Ayat (1) tidak dapat diartikan sebagai perjanjian yang terbuka karena makna Pasal tersebut sama sekali tidak bermaksud membolehkan pihak ketiga bergabung dalam perjanjian.
- c. Pihak ketiga dapat menjadi anggota ataupun peserta dalam perjanjian apabila disepakati oleh kedua belah pihak dan harus membuat perjanjian yang baru bersama Indonesia sesuai dengan kepentingannya masing-masing tanpa melanggar kesepakatan awal pada perjanjian pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Admawiria, Suhaidi. 1996. *Pengantar Hukum Internasional (II)*. CV Aula. Jakarta
- AK, Syahmin. 1985. *Hukum Perjanjian Internasional*. CV Armico. Bandung.
- . 1992. *Hukum Internasional Publik (Dalam Kerangka Studi Analitis)*. Binacipta. Bandung
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Damian, Eddy. 1991. *Kapita Selekta Hukum Internasional*. Alumni. Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1982. *Pengantar hukum Internasional*. Binacipta. Bandung.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Nasution, Adnan Buyung Dan M.Zen A. Patra. 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kelompok Kerja Ake Arif. Jakarta.

Oppeheim Lauterpacht, 1967. *International Law.*, 8th ed. Longmans.

Parthiana, I Wayan. 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. CV Yrama Widya. Bandung.

Sastroamidjojo, Ali. 1971. *Pengantar Hukum Internasional*. Bharata. Jakarta.

Situni, F.A. Whisnu. 1989. *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Mandar Maju. Bandung.

Starke, J.G. 2001. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Suryono Eddy. 1984. *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*. Remadja Karya CV. Bandung.

Yasir, Armen. 2004. *Diktat Hukum Perundang-Undangan Tata Cara Pembentukan Perda*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.